

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perubahan kelembagaan politik sebagai konsekuensi amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang umum MPR 2002 telah menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan pula pada mekanisme *elektoral*, baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. Suksesi kepemimpinan nasional tidak lagi tergantung pada proses politik terbatas di parlemen melainkan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Pada pemilu 2004 ini rakyat sendiri yang akan menentukan pilihannya terhadap calon presiden dan wakil presiden secara langsung tanpa memberikan mandat kepada MPR.¹ Sebagai sesuatu yang baru, pemilihan presiden secara langsung tentunya akan melahirkan berbagai konsekuensi baru pula. Salah satu konsekuensinya adalah legitimasi yang dimiliki presiden terpilih nantinya akan sangat besar karena ia memperoleh mandat langsung dari rakyat.²

Secara umum dikatakan bahwa pemilihan presiden secara langsung itu lebih demokratis. Namun secara khusus untuk pengalaman Indonesia paling tidak ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung dianggap perlu. **Pertama**, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Alasan tersebut muncul karena berdasarkan pemilihan

¹ Sidarta Gautama, *Megawati Soekarnoputri Di Tengah Rivalitas Sengit Calon-Calon Presiden*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hal 6

² Nurholish Madjid, *Melahirkan Kepemimpinan Baru*, Jawa Pos, Senin 7 Juli 2004, hal 4

presiden tahun 1999, ternyata konfigurasi dukungan politik rakyat terhadap calon yang diajukan oleh partai politik berbeda dengan konfigurasi kehendak wakil-wakilnya di MPR yang memiliki hak formal-konstitusional untuk memilih presiden atas nama rakyat. **Kedua**, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan sesuai dengan yang berlaku di dalam sistem presidensiil. Presiden yang dipilih secara langsung tidak dapat dijatuhkan oleh lembaga perwakilan rakyat kecuali dalam hal yang sangat luar biasa atau karena terjadinya pelanggaran hukum.³

Untuk sistem multipartai seperti yang ada di Indonesia sekarang ini akan sangat sulit pemilihan presiden bisa selesai dalam satu putaran. Pemilihan presiden secara langsung ini diselenggarakan dalam dua putaran. Pemilihan presiden putaran pertama diselenggarakan pada 5 Juli 2004 dan untuk putaran kedua diselenggarakan 20 September 2004. Pada pemilihan presiden putaran pertama diikuti oleh lima pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yaitu pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid, pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, pasangan Amien Rais-Siswono Yudhohusodo, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla dan pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar.⁴

Pada hari Senin 26 Juli 2004, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara resmi bahwa pasangan SBY-Jusuf Kalla dan Megawati-Hasyim lolos pada pemilihan presiden putaran pertama dan berhak untuk mengikuti

³ Moh. Mahfud MD, *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Perspektif Politik dan Hukum Tata Negara*, UNISIA No.51/XXVII/1/2004, UII, Yogyakarta, 2004, Hal 17-20

⁴ Suara KPU No. 21 tanggal 15 Juni 2004 diterbitkan oleh Media Center KPU, Jakarta, 2004

pemilihan presiden putaran kedua yang diselenggarakan 20 September 2004. Diantara total pemilih yang menggunakan hak suaranya, pasangan SBY-Jusuf Kalla mendapatkan suara sekitar 33,58 persen, pasangan Megawati-Hasyim mendapatkan suara sekitar 26,61 persen, pasangan Wiranto-Wahid sekitar 22,16 persen, pasangan Amien-Siswono sekitar 14,66 persen dan pasangan Hamzah-Agum hanya mendapatkan suara sekitar 3,01 persen. Berdasarkan statistika kemenangan diatas, diluar dugaan ternyata pasangan SBY-Jusuf Kalla mampu mengalahkan beberapa rival politiknya yang sudah tidak asing lagi dalam kancah perpolitikan nasional kita.⁵

Apabila konsisten pada amanat konstitusi, maka kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki kans yang sama untuk mengikuti pemilihan sehingga peluang untuk meraih kemenangan amat tergantung pada strategi politik masing-masing kandidat untuk meraih simpati dari pemilih.⁶ Baik SBY maupun Megawati beserta tim suksesnya telah mempersiapkan berbagai macam strategi untuk memperebutkan kursi kepresidenan dalam pemilihan presiden 2004 ini. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Strategi Pemenangan SBY dan Megawati Dalam Pemilihan Presiden 2004”**.

⁵ Agus Hilman, *Melampaui Dikotomi Sipil-Militer*, Jawa Pos, Sabtu 31 Juli 2004, Hal.4

⁶ Sidarta Gautama, *op.,cit*, Hal.6

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini secara umum adalah untuk mengetahui bagaimanakah strategi yang digunakan oleh SBY dan Megawati beserta tim suksesnya untuk mendapatkan dukungan dari pemilih guna memenangkan pemilihan presiden. Bagi penulis, penulisan ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan konsep dan teori hubungan internasional yang penulis peroleh selama dibangku kuliah. Dan secara khusus, penulisan ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan pencapaian gelar strata-1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Dengan berakhirnya perhitungan suara pemilihan presiden putaran pertama, maka kita dapat mengetahui bahwa pasangan yang masuk dalam pemilihan presiden putaran kedua adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Muhammad Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Besarnya suara yang diperoleh Megawati tidak terlepas dari mesin politik PDI-Perjuangan yang cukup solid dan berdana besar. Dilain pihak, kemenangan SBY pada pemilihan presiden putaran pertama tidak bisa dilepaskan dari figur SBY yang karismatik, berwibawa, dan tenang. Walaupun perolehan suara Partai Demokrat sebagai kendaraan politik SBY tidak masuk tiga besar dalam pemilu legislatif, namun banyaknya dukungan

partai yang lain cukup memperkuat suara SBY dalam pemilihan presiden putaran pertama.⁷

Hal yang sangat menentukan dalam pemilihan presiden putaran pertama adalah adanya citra sebagai orang yang tertindas. Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang masuk ke putaran kedua ini senantiasa membangun opini publik (*opinion building*) bahwa dirinya adalah orang yang tertindas atau termarginalkan. Dengan tumbanganya Soeharto dari presiden, Megawati tampil ke publik sebagai orang yang ditindas dan selalu disingkirkan Orde Baru. Dengan gaya menyantuni “wong cilik”, partai yang dipimpin Megawati, PDI-Perjuangan pada pemilu 1999 bisa memperoleh dukungan suara yang sebanyak-banyaknya melebihi perolehan suara Partai Golkar.

Hal yang sama terjadi pada SBY. Setelah mundur dari jabatan Menko Polkam pada Kabinet Gotong Royong, SBY menampilkan diri sebagai orang yang diperlakukan diskriminatif oleh pemerintahan Megawati. Apalagi ketika suami Megawati, Taufik Kiemas, mencaci maki SBY didepan publik dan menilainya kekanak-kanakan, karena SBY lebih suka mengadu kepada media massa daripada kepada Presiden Megawati sebagai atasannya. Tentu saja SBY bisa menarik simpati dan dukungan dari masyarakat. Dengan bentuk tubuh yang tinggi kekar, *cool* dan meyakinkan, SBY siap bertarung dalam pemilihan presiden putaran pertama lalu. Perjuangannya tidak sia-sia, karena dia mampu mengalahkan pasangan calon

⁷ As'ad Amirul Maftuhin, *David vs Goliath*, Jawa Pos, Rabu, 14 Juli 2004, Hal. 4

presiden yang lain.⁸ Megawati sama dengan SBY. Kemenangan Megawati pada pemilu 1999 lebih ditentukan oleh faktor primordialisme, ikatan emosional, dan karisma sang ayah, Soekarno. Megawati tidak mempunyai prestasi yang cukup dibanggakan. Baik Megawati maupun SBY sama-sama lahir dan tumbuh akibat konflik. Megawati mungkin patut berterima kasih kepada Soeharto, sedangkan SBY patut berterima kasih kepada Megawati.⁹

Dalam pemilu demokratis yang diikuti oleh *incumbent*, putaran final pemilihan presiden bagaikan referendum terhadap kinerja pemerintah. Sang presiden berpeluang besar melanjutkan kekuasaan bila kinerja pemerintahannya dipersepsikan berhasil oleh sebagian pemilih.¹⁰ Fakta bahwa Megawati berhadapan dengan SBY di putaran kedua menjadikan pemilu presiden putaran kedua sebagai kompetisi antara *incumbent* (pejabat) dengan *challenger* (penantang). Kondisi ini cenderung positif bagi demokratisasi di Indonesia di masa datang karena akan menjadi pelajaran bagi siapa pun yang terpilih sebagai presiden bahwa untuk dapat terpilih lagi pada periode berikut, ia harus menunjukkan kinerja yang baik dalam pemerintahan agar mayoritas rakyat tetap menaruh kepercayaan kepadanya.

Pemilu presiden putaran kedua yang menghadapkan *incumbent* versus *challenger* juga baik untuk pelajaran politik bagi publik sebab publik diharuskan untuk memikirkan betul kinerja pemerintahan calon presiden yang sedang berkuasa

⁸ M. Salman Hamdani, *Popularitas Bukan Segalanya*, Jawa Pos, Jumat 16 Juli 2004, Hal. 4

⁹ Fransiskus Uba Ama, *Mega karena Soeharto-SBY karena Mega*, Jawa Pos, Sabtu 17 Juli 2004, Hal. 4

¹⁰ Adman Nursal, *Mega vs SBY: Siapa Menang?*, Kolom Gatra No.45 Beredar Jumat 17 September 2004

sebagai bahan evaluasi menjelang pemilu presiden putaran kedua. Disisi lain, SBY selaku *challenger* dituntut mampu menawarkan konsep dan solusi alternatif untuk beragam persoalan bangsa dan negara sekarang ini.¹¹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah strategi yang digunakan oleh SBY dan Megawati beserta tim suksesnya untuk mendapatkan dukungan dari massa pemilih sehingga dapat memenangkan pemilihan presiden 2004.

E. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan mengapa sesuatu bisa terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Penggunaan teori selain untuk melakukan eksplanasi juga menjadi dasar bagi prediksi. Selain itu juga digunakan konsep untuk mengorganisasi dan mengidentifikasi fenomena yang menarik perhatian. Teori menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep ini secara logis saling berhubungan.¹²

Berkaitan dengan menganalisa permasalahan yang dikemukakan, maka akan digunakan beberapa konsep sebagai acuan :

¹¹ Muhammad Qadari, *Implikasi Politik Pilpres Putaran Pertama*, Kompas, Senin, 12 Juli 2004, Hal. 4

¹² Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, Hal. 185

1. Konsep Strategi

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹³ Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, maka kegiatan yang dimaksud adalah penyelenggaraan pemilihan presiden putaran kedua yang dilaksanakan pada 20 September 2004 yang diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla dan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Sedangkan sasaran khusus yang ingin di capai oleh kedua pasangan tersebut adalah memenangkan kursi presiden untuk periode 2004-2009. Untuk itu masing-masing kandidat menyiapkan berbagai macam strategi demi mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Konsep Kampanye

Kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen dan badan lain untuk mendapatkan dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.¹⁴ Dalam SK KPU No.35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bab 1 pasal 1 butir 9 menyebutkan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon beserta tim kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program kerja pasangan calon secara lisan ataupun tertulis kepada masyarakat dalam jadwal waktu yang ditetapkan oleh KPU.

¹³ B.N Marbun, SH, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hal. 600

¹⁴ B.N Marbun, SH, *op.cit.*, Hal. 303

Tim kampanye itu sendiri adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau mencalonkan pasangan calon tersebut yang bertugas dan berwenang membantu kelancaran pelaksanaan kampanye pasangan calon serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.¹⁵ Pasangan Megawati-Hasyim Muzadi telah membentuk tim kampanye yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI-Perjuangan Sutjipto dan wakilnya Ahmad Bagdja yang merupakan Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Mereka menyebutnya sebagai tim 20 yang anggotanya memang 20 orang gabungan dari unsur PDI-Perjuangan dan unsur NU. Demikian hal-nya dengan pasangan SBY-Jusuf Kalla juga telah membentuk tim kampanye. Tim sukses dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang merupakan pendukung pasangan SBY-Jusuf Kalla menggagas penggabungan tim sukses masing-masing ke dalam tim nasional. Tim nasional yang diketuai oleh mantan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI Letjen (purn) Moh. Ma'ruf ini mempunyai tugas utama yaitu mengantar kemenangan SBY-Jusuf Kalla menuju kursi RI-1 dan RI-2.¹⁶

Adapun yang dimaksud dengan visi adalah uraian yang berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang hendak diwujudkan. Misi adalah uraian yang berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mewujudkan visi. Sedangkan program adalah uraian yang berkenaan

¹⁵ SK KPU No.35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Bab 1 Pasal 1 Butir 10

¹⁶ *Ramai-ramai Galang Dukungan*, Kompas, Selasa 15 Mei 2004, Hal. 8

dengan langkah-langkah operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.¹⁷

Visi yang diajukan oleh pasangan SBY-Jusuf Kalla diantaranya : terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman bersatu, rukun, dan damai; terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan Hak Asasi Manusia (HAM); dan terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan misi pasangan SBY-Jusuf Kalla adalah mewujudkan Indonesia yang aman damai, adil dan demokratis, serta sejahtera.¹⁸

Visi yang diajukan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi diantaranya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, makmur, adil, aman, demokratis dan bersih; menciptakan masyarakat yang memiliki kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian bangsa. Sedangkan Misi pasangan Megawati-Hasyim Muzadi diantaranya : memperkokoh NKRI sebagai manifestasi dari prinsip kedaulatan bangsa dan negara; mewujudkan kemakmuran dan keadilan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kemandirian dalam era globalisasi; mewujudkan persamaan warga negara sebagai fondasi dari prinsip kemajemukan dalam persatuan; mewujudkan kedaulatan rakyat melalui penguatan kelembagaan, mekanisme, dan

¹⁷ SK KPU, *op.cit.*, Butir 8

¹⁸ Idris Thaha, *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 182

praktik politik demokratis; mengukuhkan martabat melalui pembangunan karakter, kepribadian, dan kemampuan bangsa.¹⁹

Menurut SK KPU No. 35 Tahun 2004 Pasal 15, kampanye dapat dilakukan dalam berbagai bentuk diantaranya : pertemuan terbatas; tatap muka atau dialog; penyebaran melalui media massa baik itu media cetak maupun media elektronik; penyiaran melalui radio atau televisi; penyebaran bahan kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat umum; rapat umum; debat publik atau debat terbuka antar calon; dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan juru kampanye harus berisi visi, misi, dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan apabila pasangan calon terpilih menjadi pasangan calon terpilih.

3. Konsep Incumbent

Incumbent adalah seseorang yang sedang memegang jabatan di pemerintahan. Dalam hal ini adalah Megawati Soekarnoputri dimana pada saat kampanye pemilihan presiden sedang berlangsung, ia masih menjabat sebagai presiden. Sebagai *incumbent*, Megawati memiliki kapasitas sumber daya politik yang memadai. Sumber daya politik tersebut sangat berpengaruh jika digunakan dalam strategi kemenangan pemilihan presiden. Sebagai presiden terakhir menjelang pemilu presiden 2004 berlangsung, mempermudah bagi dirinya dalam menguasai peta persaingan, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Dengan posisinya sebagai

¹⁹ *ibid*, Hal. 214

presiden memungkinkan dirinya memperoleh energi yang lebih besar untuk bertarung secara *all out* dibandingkan dengan pesaingnya.²⁰

Dengan kedudukannya sebagai presiden, memudahkan pula bagi Megawati untuk menemukan isu-isu strategis yang bisa dimanfaatkan sebagai tema sentral dirinya dalam berkampanye untuk meraih dukungan rakyat. Apalagi data dan sarana untuk itu setiap saat bisa tersedia untuk dirinya. Selain itu, melalui kebijakan politiknya yang populis dimasa *last minute* pemerintahannya, boleh jadi akan mengangkat popularitas Megawati di mata para pemilih. Kalau kebijakan itu sudah menyangkut hal yang “mempermudah” hajat hidup orang banyak, maka simpati publik dengan mudah dapat diraih. Sebab, itulah alasan pragmatis dikalangan kebanyakan pemilih, terutama di pedesaan tempat dimana sebagian besar pemilih berada, yang memotivasi penggunaan hak pilihnya.²¹

Namun, dibalik peluangnya meraih kembali kursi kepresidenan, maka Megawati pun mau tidak mau menghadapi persoalan cukup prinsip untuk bisa melangkah mulus ke tujuan itu. Apalagi, sistem pemilihan dengan popular vote tidak sama dengan sekedar “mengamankan” suara anggota MPR pada Sidang Umum MPR. Salah satu masalah prinsip tersebut adalah, jika calon presiden yang bertarung memperebutkan popularitas politik di mata rakyat dengan mengandalkan citra dirinya dan platform politik yang baik, tetapi Megawati justru terlebih dahulu mempertanggungjawabkan kepemimpinan dan penyelenggaraan negara semasa ia

²⁰ Sidarta Gautama, *op.cit.*, Hal 72

²¹ *ibid*, Hal. 74

menjadi Presiden RI 2001-2004. Jika ternyata Megawati gagal dalam memberikan keyakinan kepada rakyat mengenai pertanggungjawabannya tersebut, maka bukan tidak mungkin posisinya sebagai presiden justru akan menjadi bumerang dalam pencalonannya kembali.

4. Konsep Challenger

Arti kata *challenger* adalah penantang. Yang dimaksud disini adalah lawan atau rival politik Megawati dalam pemilihan presiden 2004 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY selaku *challenger* dituntut mampu menawarkan konsep dan solusi alternatif untuk beragam persoalan bangsa dan negara sekarang ini. Kemenangan SBY dengan mengalahkan Megawati dalam pemilu presiden putaran pertama, memberi indikasi bahwa publik menginginkan pergantian pemimpin.

5. Konsep Media Massa

Kampanye pemilu presiden saat ini diakui lebih banyak memanfaatkan peran media massa, sehingga dapat dikatakan bahwa calon presiden yang memenangkan kampanye adalah yang dapat menguasai media massa. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi yang berfungsi untuk menyalurkan informasi, berita, maupun pesan kepada masyarakat luas.²²

Media massa baik itu media cetak maupun media elektronik sebagai instrumen informasi menjadi sangat efektif untuk menyampaikan pesan dan membangun citra, hingga pada akhirnya menggiring opini publik untuk memilih calon presiden yang bersangkutan. Hampir seluruh media massa mulai dari surat

²² Kamur Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Depdiknas, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 726

kabar, majalah, radio, dan televisi dimanfaatkan oleh para calon presiden untuk berkampanye dan menarik hati para calon pemilih.

6. Konsep Partai Politik

Sistem politik modern pada dasarnya adalah *party-based system*, yaitu suatu kehidupan politik dimana aspirasi masyarakat mendapat saluran politik melalui sistem politik. Dalam sistem ini, partai politik melakukan artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan pada akhirnya sebagai institusi yang berkompetisi untuk memperoleh kekuasaan. Adalah melalui partai politik pula rakyat melakukan kontrol tidak hanya pada pemerintah melalui parlemen, melainkan juga kontrol terhadap partai itu sendiri.²³

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum; menjadi anggota partai politik; duduk dalam lembaga politik seperti DPR atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat

²³ Edy Prasetyono, *Pembangunan sistem adalah prioritas*, Kompas, 31 Juli 2004

yang duduk di DPR; berkampanye, dan lain sebagainya.²⁴ Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi²⁵:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini partai politik bertindak sebagai penghubung, maksudnya menghubungkan antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah. Partai politik bertindak sebagai penghubung yang menampung arus informasi, baik informasi yang berasal dari pihak penguasa kepada masyarakat maupun yang berasal dari masyarakat ke pihak penguasa.

Oleh karena partai politik menyalurkan informasi dari masyarakat kepada pihak penguasa, maka berarti partai politik mempunyai tugas untuk menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat, serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga semua pendapat dan aspirasi masyarakat tersebut dapat tersalurkan. Sebaliknya, partai politik juga menyalurkan informasi yang datangnya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Dengan demikian terjadilah arus informasi bolak-balik, dari pihak penguasa kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pihak penguasa. Dalam menjalankan fungsi ini, partai politik dapat disebut sebagai penyambung atau penyalur informasi.

2. Partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1977, Hal 161

²⁵ Drs. Haryanto, *Sistem Politik Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 89

Sosialisasi politik secara umum dapat dinyatakan sebagai cara untuk mewariskan atau mengajarkan keyakinan-keyakinan politik dari suatu generasi yang lebih tua kepada generasi berikutnya. Sehubungan dengan hal tersebut, partai politik juga memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik, disamping sarana-sarana sosialisasi politik yang lain seperti keluarga, sekolah, kelompok bermain, lingkungan pekerjaan, media massa dan sebagainya.

Partai politik disamping menanamkan ideologi partai kepada para pendukungnya, harus pula mengajarkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan politik yang berlaku di masyarakat atau di negara-nya. Partai politik juga harus mendidik warga masyarakat agar supaya mempunyai kesadaran dan tanggungjawab yang tinggi sebagai warga negara dan lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan.

4. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik dalam fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menjadi anggota partai. Partai politik berusaha untuk menarik minat warga negara agar bersedia menjadi anggota partai. Sehubungan dengan hal itu berarti partai politik turut serta memperluaskan partisipasi warga negara di bidang politik. Rekrutmen politik ini merupakan salah satu cara untuk menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin.

Rekrutmen politik ini juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup partai politik yang bersangkutan. Dengan adanya anggota-anggota partai yang

dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, maka berarti pula proses regenerasi didalam tubuh partai yang bersangkutan akan dapat berjalan lancar, dan hal ini pula berarti bahwa kelangsungan hidup partai dari segi kepemimpinan partai sudah dapat terjamin.²⁷

5. Partai politik sebagai sarana pembuatan kebijaksanaan

Dapatlah dinyatakan bahwa partai politik sebagai sarana pembuatan kebijaksanaan apabila partai tersebut merupakan partai yang memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan secara mutlak. Apabila partai tersebut hanya berkedudukan menjadi partai oposisi, maka partai tersebut tidak merupakan sarana pembuatan kebijaksanaan, akan tetapi partai tersebut berperan sebagai pengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.²⁸

Hasil pemilu legislatif 5 April 2004 sudah menampilkan peta kekuatan partai politik berikut tokoh yang dijagokan untuk pemilihan presiden. Tidak adanya partai yang memiliki suara mayoritas mengharuskan pembentukan koalisi. Meskipun demikian, secara keseluruhan terdapat dua kubu besar yang memperoleh suara pemilih masih didominasi oleh Partai Golkar dan PDI-Perjuangan. Namun, mau tidak mau pilihan berkoalisi menjadi prioritas karena pertimbangan suara yang mereka peroleh setidaknya merepresentasikan dukungan masyarakat.²⁹

²⁷ Drs. Haryanto, *op.cit.*, hal 92-94

²⁸ Drs. Haryanto, *op.cit.*, hal 95-96

²⁹ *Koalisi Putih atau Dagang Sapi*, Kompas, Sabtu, 10 April 2004, Hal. 31

**Tabel 1. Perolehan suara dan kursi DPR-RI partai politik
Hasil pemilu legislatif 5 April 2004**

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi	Persentase
1	PNI Marhenisme	923.159	0,81%	1	0,18%
2	PBSD	636.397	0,56%	0	0,00%
3	PBB	2.970.487	2,62%	11	2,00%
4	Partai Merdeka	842.541	0,74%	0	0,00%
5	PPP	9.248.764	8,15%	58	10,55%
6	PPDK	1.313.654	1,16%	4	0,75%
7	PPIB	672.952	0,59%	0	0,00%
8	PNBK	1.230.455	1,08%	0	0,00%
9	Partai Demokrat	8.455.225	7,45%	56	10,08%
10	PKPI	1.424.240	1,26%	1	0,18%
11	PPDI	855.811	0,75%	1	0,18%
12	PPNUI	895.610	0,79%	0	0,00%
13	PAN	7.303.324	6,44%	53	9,64%
14	PKPB	2.399.290	2,11%	2	0,36%
15	PKB	11.989.564	10,57%	52	9,45%
16	PKS	8.325.020	7,34%	45	8,18%
17	PBR	2.764.998	2,44%	14	2,55%
18	PDI-Perjuangan	21.026.629	18,53%	109	19,82%
19	PDS	2.414.254	2,13%	13	2,36%
20	Partai Golkar	24.480.757	21,58%	127	22,86%
21	Partai Patriot Pancasila	1.072.139	0,95%	0	0,00%
22	Partai Sarikat Indonesia	679.296	0,60%	0	0,00%
23	PPD	657.916	0,58%	0	0,00%
24	Partai Pelopor	878.932	0,77%	3	0,55%
	T o t a l	113.462.414	100%	550	100%

Sumber : www.kpu.go.id

Koalisi dalam wacana politik merupakan suatu kebutuhan apabila suatu partai tidak memiliki suara mayoritas dalam parlemen. Kasus yang terjadi pada pemilu legislatif yang lalu membuktikan bahwa partai politik peserta pemilu 2004 tidak ada yang memperoleh suara mutlak atau 50% lebih satu dalam parlemen. Hal ini membuka peluang bagi partai-partai yang ada termasuk PDI-Perjuangan dan

Partai Demokrat sebagai kendaraan politik bagi Megawati dan SBY untuk berkoalisi.³⁰

Dalam proses politik pemilihan presiden, kubu Mega-Hasyim lebih tertuju pada koalisi partai secara penuh. Hal ini didasari oleh suatu pemikiran, walaupun dalam pemilu kali ini masyarakat mempunyai independensi dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, keberadaan partai politik tetap harus menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi yang sedang dibangun. Dapat disimak dari statemen tim kampanye Mega-Hasyim bahwa suatu pemerintahan yang kuat harus didukung pula oleh parlemen yang kuat. Untuk itu, awal pendekatan yang dilakukan oleh kubu Mega-Hasyim lebih dominan pada pendekatan institusi yaitu membangun komunikasi politik lewat pimpinan partai politik, terlebih yang dianggap mempunyai kekuatan besar di parlemen seperti Partai Golkar dan PPP. Pendekatan dengan kedua partai tersebut diwujudkan dalam bentuk Koalisi Kebangsaan yang dideklarasikan pada 19 Agustus 2004. Dengan mesin politik Koalisi Kebangsaan yang dijalankan sebelum pemilu presiden berlangsung, diharapkan akan dapat bekerja secara maksimal untuk menjangkau masyarakat dikalangan akar rumput.

Pola pendekatan yang dilakukan Mega-Hasyim berlawanan dengan pendekatan yang dilakukan oleh SBY-Kalla. Sementara Megawati lebih tertuju pada pembentukan koalisi penuh dengan partai politik menjelang pemilu presiden, SBY lebih tertuju pada pembangunan koalisi terbatas. Koalisi terbatas dibangun oleh SBY untuk mendukung pemerintahannya, dan itupun dilakukan paska pemilihan. Jadi

³⁰ *Popularitas vs Mesin Politik Sekedar Referensi*, Wismamas, google.com, Rabu, 28 Juli 2004

koalisi yang diinginkan SBY adalah koalisi yang bisa memperkuat pemerintahan dan menjalankannya secara efektif, bukan koalisi yang diawali dengan bagi-bagi kekuasaan.³¹

F. Hipotesa

1. Memanfaatkan partai politik dalam bentuk koalisi. Megawati membentuk Koalisi Kebangsaan sebelum pelaksanaan pemilu, sedangkan SBY membentuk Koalisi Terbatas setelah pelaksanaan pemilu.

2. Melakukan kampanye secara langsung dalam bentuk tatap muka dengan massa pendukung maupun kampanye secara tidak langsung melalui media massa cetak dan elektronik untuk membangun citra positif di depan pemilih.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penelitian dan menghindari kesulitan dalam mencari data, maka penulisan skripsi ini didasarkan pada data yang ada yaitu bulan Maret sampai September 2004. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa data yang diambil adalah data-data sebelum bulan Maret 2004 sebagai bahan tinjauan dan bandingan serta yang pasti sepanjang data-data tersebut masih relevan dengan penelitian ini.

³¹ Imam Subhkan, *Jalan Menuju Kemenangan*, Kompas, Rabu, 25 Agustus 2004, Hal. 4

G. Metode Pengumpulan Data

Agar penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu didukung oleh data-data yang akurat dan dapat dipercaya. Data-data tersebut diperoleh dari studi pustaka yaitu tehnik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, majalah, kliping koran, tabloid, jurnal, internet dan sumber-sumber lain yang relevan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, berikut latar belakang masalah dan permasalahannya. Permasalahan yang diangkat adalah strategi apa yang digunakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati untuk memperoleh dukungan suara dalam upaya memenangkan pemilihan presiden putaran kedua 20 September 2004. Kerangka teori yang dipergunakan adalah konsep strategi, konsep kampanye, konsep *incumbent*, konsep *challenger*, konsep media massa, dan konsep partai politik. Hipotesa yang diperoleh adalah memanfaatkan partai politik dalam bentuk koalisi. Ada dua bentuk koalisi yang dibangun oleh para kandidat. Pasangan Mega-Hasyim lebih tertuju pada pembangunan koalisi partai politik secara penuh melalui Koalisi Kebangsaan. Sedangkan pasangan SBY-Jusuf Kalla lebih tertuju pada pembangunan Koalisi Terbatas. Strategi yang kedua adalah melaksanakan kampanye secara langsung dalam bentuk pertemuan langsung dengan massa pendukung, dan kampanye secara tidak langsung yaitu melalui media massa baik media cetak maupun elektronik untuk

membentuk citra positif didepan massa pemilih. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan jangkauan penulisan antara bulan Maret sampai September 2004.

Bab II akan memaparkan mengenai tiga hal yaitu pertama, gambaran secara umum mesin partai Megawati dan SBY dalam pemilihan presiden putaran kedua yaitu PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat. Kedua, merupakan analisis hasil pemilu legislatif 2004, yaitu mengenai turunnya perolehan suara PDI-P yang signifikan dibanding dengan perolehan suara PDI-P pada pemilu 1999 dan menjelaskan tentang fenomena menguatnya suara Partai Demokrat sebagai partai pendatang baru sekaligus merupakan kendaraan politik bagi SBY. Bagian ketiga, akan menguraikan strategi SBY dan Megawati dalam memanfaatkan mesin partai yang dimiliki keduanya. Dalam hal ini Megawati lebih berkonsentrasi untuk memaksimalkan mesin partai yang dimiliki yakni PDI-P dengan cara membangun kerja sama dengan partai-partai pemenang pemilu legislatif dan diwujudkan dalam bentuk Koalisi Kebangsaan. Koalisi ini dibangun sebelum pelaksanaan pemilu presiden dengan harapan dapat menjangkau kalangan akar rumput. Koalisi Kebangsaan yang dibangun pasangan Mega-Hasyim ini mendapat respons positif dari beberapa partai lain seperti Partai Golkar, PPP, PDS, PBR, PKPB, dan PNI Marhaenisme. Berbeda dengan Megawati yang lebih fokus pada pembentukan koalisi dengan partai-partai besar, SBY lebih memilih formula koalisi terbatas dan itupun dilakukan SBY setelah pelaksanaan pemilu presiden. SBY lebih fokus untuk menggalang dukungan rakyat secara langsung tanpa melalui partai. Pemikiran tersebut dilandasi oleh sistem pemilu

presiden secara langsung, dimana rakyat mempunyai kedaulatan penuh untuk memilih presiden yang dikehendaki.

Bab III akan memaparkan mengenai tiga hal yaitu pertama mengenai pengertian kampanye menurut SK KPU No. 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bagian kedua akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kampanye yang dilakukan oleh SBY maupun Megawati beserta tim sukses masing-masing. Menurut SK KPU No.35 Tahun 2004, ada 9 bentuk kampanye yang dapat dilakukan oleh masing-masing capres dalam rangka mendapatkan simpati dan dukungan dari pemilih. Bentuk-bentuk kampanye tersebut diantaranya: pertemuan terbatas, tatap muka atau dialog, penyebaran melalui media massa cetak dan elektronik, penyiaran melalui radio dan televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, debat publik atau debat terbuka antar calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan (seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada suatu tempat tertentu). Bagian yang ketiga akan membahas tentang peran media massa dan LSM (dalam hal ini adalah lembaga survei atau lembaga jajak pendapat). Keberadaan media massa baik itu media cetak maupun elektronik sangat penting digunakan masyarakat maupun pemerintah dalam mempublikasikan pesan-pesan politik. Media massa juga berperan dalam membentuk pendapat umum, bahkan media massa dapat berperan aktif meningkatkan disiplin rakyat dalam kehidupan bangsa. Sedangkan keberadaan lembaga survei pada masa

pemilu dapat menjadi sebuah variabel positif bagi fungsi aspirasi rakyat yang diwakili responden serta isu yang diangkat melalui berbagai penelitian ilmiah. Lembaga survei sebagai salah satu instrumen intelektual juga berperan besar dalam memberikan pendidikan politik yang cerdas bagi rakyat.

Bab IV merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.